

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LEBAK

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibukotanya adalah Rangkasbitung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat.¹

Kabupaten Lebak terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas 340 desa dan 5 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Rangkasbitung, yang berada di bagian utara wilayah kabupaten. Kota ini dilintasi jalur kereta api Jakarta-Merak.

Secara geografis wilayah Kabupaten Lebak berada pada 105 25° – 106 30 BT dan 6 18° – 7 00° LS. Bagian utara kabupaten ini berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung

¹ Profil Kabupaten Lebak (2019), <https://lebakkab.go.id/profil-kabupaten-lebak/>, diakses pada 16 Juli 2019, pukul 22:13 WIB.

tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sungai Ciujung mengalir ke arah utara, merupakan sungai terpanjang di Banten.

Baduy merupakan salah satu objek wisata yang dimiliki Kabupaten Lebak dan sering dikunjungi wisatawan mancanegara karena memiliki keunikan tersendiri.²

2. Sejarah Kabupaten Lebak

Sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Banten, Kabupaten Lebak dengan luas Wilayah 304.472 Ha, sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kesultanan Banten.

Berkaitan dengan Hari Jadi Kabupaten Lebak yang jatuh pada tanggal 2 Desember 1828, terdapat beberapa catatan sejarah yang menjadi dasar pertimbangan, antara lain:

a. Pembagian Wilayah Kesultanan Banten

Pada tanggal 19 Maret 1813, Kesultanan Banten dibagi 4 wilayah yaitu:

- Wilayah Banten Lor
- Wilayah Banten Kulon

² Profil Kabupaten Lebak (2019), <https://lebakkab.go.id/profil-kabupaten-lebak/>, diakses pada 16 Juli 2019, pukul 22:13 WIB.

- Wilayah Banten Tengah
- Wilayah Banten Kidul

Ibukota Wilayah Banten Kidul terletak di Cilangkahan dan pemerintahannya dipimpin oleh Bupati yang diangkat oleh Gubernur Jendral Inggris (Raffles) yaitu Tumenggung Suradilaga.

- b. Pembagian Wilayah Keresidenan Banten Jenderal Nomor 1, Staatsblad Nomor 81 tahun 1828, Wilayah Keresidenan Banten dibagi menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu :
- Kabupaten Serang
 - Kabupaten Caringin
 - Kabupaten Lebak

Wilayah Kabupaten Lebak, berdasarkan pembagian diatas memiliki batas-batas yang meliputi District dan Onderdistrict yaitu :

- 1) District Sajira, yang terdiri dari Onderdistrict Ciangsa, Somang dan Onderdistrict Sajira.
- 2) District Lebak Parahiang, yang terdiri dari Onderdistrict Koncang dan Lebak Parahiang.

- 3) District Parungkujang, yang terdiri dari Onderdistrict Parungkujang dan Kosek.
- 4) District Madhoor (Madur) yang terdiri dari Onderdisriect Binuangeun, Sawarna dan Berdasarkan Surat Keputusan Komisariss Onderdistrict Madhoor (Madur).³

c. Pemindahan Ibukota Kabupaten Lebak

Pada tahun 1851, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, nomor 15 tanggal 17 Januari 1849,

Ibukota Kabupaten Lebak yang saat itu berada di Warunggunung dipindahkan ke Rangkasbitung. Pelaksanaan pemindahannya secara resmi baru dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1851.

d. Perubahan Wilayah Kabupaten Lebak

Wilayah Kabupaten Lebak yang pada tahun 1828 memiliki District, dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 29 Oktober 1828, Staatsblad nomor 266 tahun 1828, diubah menjadi:

³ Profil Kabupaten Lebak (2019), <https://lebakkab.go.id/profil-kabupaten-lebak/>, diakses pada 16 Juli 2019, pukul 22:13 WIB.

- District Rangkasbitung, meliputi Onderdistrict Rangkasbitung, Kolelet Wetan, Warunggunung dan Onderdistrict Cikukur.
 - District Lebak, meliputi Onderdistrict Lebak, Muncang, Cilaki dan Cikeuyeup.
 - District Sajira meliputi Onderdistrict Sajira, Saijah, Candi dan Maja.
 - District Parungkujang, meliputi Onderdistrict Parungkujang, Kumpay, Cileles dan Bojongmanik.
 - District Cilangkahan, meliputi Onderdistrict Cilangkahan, Cicalabuh, Cihara dan Bayah.
- e. Tanggal 14 Agustus 1925

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 14 Agustus 1925, Staatsblad nomor 381 tahun 1925 Kabupaten Lebak menjadi daerah Pemerintahan yang berdiri sendiri dengan wilayah meliputi District Parungkujang, Rangkasbitung, Lebak dan Cilangkahan.

- f. Tanggal 8 Agustus 1950

Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan

Propinsi Jawa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak beserta seluruh aparat serta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Lebak melalui wakil-wakilnya di DPRD, telah berhasil menentukan Hari Jadi Kabupaten Lebak dengan lahirnya Keputusan DPRD nomor 14/172.2/D-II/SK/X/1986, yang memutuskan untuk menerima dan menyetujui bahwa Hari Jadi Kabupaten Lebak jatuh pada tanggal 2 Desember 1828.

3. Visi dan Misi Kabupaten Lebak

a. Visi Kabupaten Lebak 2019-2024

“Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal”

b. Misi Kabupaten Lebak 2019-2024

- Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM.
- Meningkatkan Produktifitas Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata.
- Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah.
- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

B. Deskripsi Data Penelitian

Tabel 4.1
Data Penelitian Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Lebak 2012-2018
(Rupiah)

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Total Pendapatan Daerah	Total Belanja Daerah
2012	97.190.329.884	127.294.755.924	1.291.289.884.478	1.274.592.540.523
2013	147.202.074.600	136.180.145.486	1.475.432.194.169	1.514.838.642.901
2014	236.900.317.500	244.448.053.657	1.796.231.788.248	1.725.537.969.208
2015	263.829.616.592	301.549.435.182	2.392.584.541.040	1.918.861.996.559
2016	320.167.214.575	340.383.514.945	2.760.214.331.476	2.095.723.566.551
2017	454.943.351.087	406.362.782.255	2.359.989.445.598	2.297.709.912.998
2018	299.732.587.100	358.314.884.766	2.517.030.882.786	2.369.973.876.528

Sumber: *BPS Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Lebak*

Berdasarkan pada tabel 4.1 di atas realisasi PAD Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2018 realisasi PAD Kabupaten Lebak mengalami penurunan yaitu sebesar 12% terhadap tahun sebelumnya. Sepanjang 6 (enam) tahun terakhir, pendapatan dari PAD pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang paling terbesar terjadi pada tahun 2017, dimana PAD yang didapatkan sebesar Rp. 406.362.782.255.

Total keseluruhan pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Lebak terjadi naik dan turun dalam 6 (enam) tahun terakhir, pendapatan yang paling besar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 2.760.214.331.476. Dan belanja pemerintah daerah Kabupaten Lebak setiap tahunnya terus meningkat.

C. Analisis Data

Analisis pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Lebak dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2000-2018. Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis pendapatan asli dan kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lebak pada penelitian ini adalah: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Lebak yang didapat dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Lebak. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak. Adapun hasil dari Analisis pendapatan asli daerah tersebut adalah:

1. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Berikut ini hasil analisis data kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{Rp. 127.294.755.924}}{\text{Rp. 1.274.592.540.523}} 100\% \\ &= 9,9\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{Rp. 136.180.145.486}}{\text{Rp. 1.514.838.642.901}} 100\% \\ &= 9\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp. 244.448.053.657}}{\text{Rp. 1.725.537.969.208}} 100\% \\ &= 14\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp. 301.549.435.182}}{\text{Rp. 1.918.861.996.559}} 100\% \\ &= 15,7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp. 340.383.514.945}}{\text{Rp. 2.095.723.566.551}} 100\% \\ &= 16,2\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp. 406.362.782.255}}{\text{Rp. 2.297.709.912.998}} 100\% \\ &= 17,6\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp. 358.314.884.766}}{\text{Rp. 2.369.973.876.528}} 100\% \\ &= 15,1\% \end{aligned}$$

Tabel 4.2
Kemandirian Pemerintah Kabupaten Lebak

Tahun	PAD	Belanja Daerah	Rasio Kemandirian
2012	127.294.755.924	1.274.592.540.523	9,9%
2013	136.180.145.486	1.514.838.642.901	9%
2014	244.448.053.657	1.725.537.969.208	14%
2015	301.549.435.182	1.918.861.996.559	15,7%
2016	340.383.514.945	2.095.723.566.551	16,2%
2017	406.362.782.255	2.297.709.912.998	17,6%
2018	358.314.884.766	2.369.973.876.528	15,1%

Sumber: Data diolah

Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lebak dalam kurun 7 tahun terakhir 2012-2018 berdasarkan hasil perhitungan data pada tabel 4.1 di atas masih rendah sekali atau pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Sepanjang 7 tahun terakhir, rasio kemandirian pemerintah daerah Kabupaten

Lebak tidak pernah sampai pada rasio prosentase di atas 25%. Pada tahun 2012 rasio kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Lebak hanya mampu memperoleh kemandirian sebesar 9,9%, tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 9%. Sementara pada 4 tahun selanjutnya 2014-2017, rasio kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Lebak mengalami kenaikan masing-masing sebesar 14%, 15,7%, 16,2% dan 17,6%. Tahun 2018 rasio kemandirian kabupaten Lebak mengalami penurunan menjadi 15.1%.

Berdasarkan dari hasil data tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa rasio kemandiria pemerintah daerah Kabupaten Lebak masih rendah sekali, dengan pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Lebak sepanjang periode 2012 sampai dengan 2018.

2. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Berikut ini hasil analisis data efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{127.294.755.924}{97.190.329.884} 100\% \\ &= 130,9\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{136.180.145.486}{147.202.074.600} 100\% \\ &= 92,5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{244.448.053.657}{236.900.317.500} 100\% \\ &= 130,1\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{301.549.435.182}{263.829.616.592} 100\% \\ &= 114,2\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{340.383.514.945}{320.167.214.575} 100\% \\ &= 106,3\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{406.362.782.255}{454.943.351.087} 100\% \\ &= 89,3\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{358.314.884.766}{299.732.587.100} 100\% \\ &= 119,5\% \end{aligned}$$

Tabel 4.3
Efektivitas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebak

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Efektivitas
2012	127.294.755.924	97.190.329.884	130,9%
2013	136.180.145.486	147.202.074.600	92,5%
2014	244.448.053.657	236.900.317.500	130,1%
2015	301.549.435.182	263.829.616.592	114,2%
2016	340.383.514.945	320.167.214.575	106,3%
2017	406.362.782.255	454.943.351.087	89,3%
2018	358.314.884.766	299.732.587.100	119,5%

Sumber: Data diolah

Rasio efektivitas atas pendapatan daerah Kabupaten Lebak berdasarkan pada tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Lebak terbilang sangat efektif, karena rata-rata efektivitas sepanjang tahun 2012 sampai dengan 2018 mencapai nilai prosentase di atas 100%. Akan tetapi terjadi penurunan efektivitas pendapatan yang terjadi pada tahun 2013 sebesar 92,5%, di mana anggaran PAD pada tahun 2012 sebesar Rp. 147.202.074.600, namun hanya terealisasi sebesar Rp. 136.180.145.486. Pada tahun 2017 efektivitas pendapatan

pemerintah daerah Kabupaten Lebak kembali menurun dengan nilai prosentase pendapatan sebesar 89,3%, dengan target anggaran sebesar Rp. 454.943.351.087 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 406.362.782.255. Pada tahun 2012 rasio efektivitas pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Lebak sebesar 130,9% dengan target anggaran sebesar Rp. 97.190.329.884 dan terealisasi sebesar Rp. 127.294.755.924. Rasio efektivitas pendapatan terus memperoleh nilai prosentase di atas 100% pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, tahun 2014 dengan target anggaran sebesar Rp. 236.900.317.500 dan terealisasi sebesar Rp. 244.448.053.657, nilai prosentasenya 130,1%, tahun 2015 dengan target anggaran sebesar Rp. 263.829.616.592 dan terealisasi sebesar Rp. 301.549.435.182, nilai prosentasenya 114,2%, tahun 2016 dengan target anggaran sebesar Rp. 320.167.214.575 dan terealisasi sebesar Rp. 340.383.514.945, nilai prosentasenya 106,3%. Tahun 2017 mengalami penurunan hanya mendapat 89,3%. Pada tahun 2018 nilai efektivitas pendapatn daerah mengalami kenaikan sebesar 119,5%, dengan target anggaran sebesar Rp. 299.732.587.100 dan terealisasi sebesar Rp. 358.314.884.766.

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menurut penulis sangat efektif, karena nilai prosentase berdasarkan 7 tahun terakhir rata-rata anggaran PAD terealisasi di atas 100%. Berdasarkan kriteria pedoman rasio efektivitas pendapatan daerah, jika realisasi suatu pemerintah daerah di atas 100% maka realisasi pendapatan sangat efektif.

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Berikut ini hasil analisis data pertumbuhan PAD pemerintah daerah Kabupaten Lebak

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{127.294.755.924 - 0}{0} 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{136.180.145.486 - 127.294.755.924}{127.294.755.924} 100\% \\ &= 6,9\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{244.448.053.657 - 136.180.145.486}{136.180.145.486} 100\% \\ &= 79,5\% \\ \text{Tahun 2015} &= \frac{301.549.435.182 - 244.448.053.657}{244.448.053.657} 100\% \\ &= 23,3\% \\ \text{Tahun 2016} &= \frac{340.383.514.945 - 301.549.435.182}{301.549.435.182} 100\% \\ &= 12,8\% \\ \text{Tahun 2017} &= \frac{406.362.782.255 - 340.383.514.945}{340.383.514.945} 100\% \\ &= 89,1\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{358.314.884.766 - 406.362.782.255}{406.362.782.255} 100\% \\ &= 19,3\% \end{aligned}$$

Tabel 4.4
Pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Lebak

Tahun	Pendapatan Awal	Pendapatan Akhir	Pertumbuhan Pendapatan
2012	0	127.294.755.924	0%
2013	127.294.755.924	136.180.145.486	6,9%
2014	136.180.145.486	244.448.053.657	79,5%
2015	244.448.053.657	301.549.435.182	23,3%
2016	340.383.514.945	340.383.514.945	12,8%
2017	340.383.514.945	406.362.782.255	89,1%
2018	406.362.782.255	358.314.884.766	19,3%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat untuk tahun 2012 sampai tahun 2018 tingkat pertumbuhan pendapatan daerah mengalami fluktuasi, pada tahun 2013 pertumbuhan pendapatan meningkat 6,9% dari pendapatan tahun 2012. Tahun 2014 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 79% dari tahun sebelumnya. 2 tahun selanjutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan, pada tahun 2015 menurun menjadi 23,3% dari tahun sebelumnya, lalu menurun kembali pada tahun 2016 12,8% dari tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan pada tahun 2017 sebesar 89,1% dari tahun sebelumnya, dan kembali menurun pada tahun 2018 ke angka 19,3% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017.

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

Berdasarkan hasil perhitungan olah data dalam rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, penulis menyimpulkan bahwa penurunan pendapatan asli daerah yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Lebak hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya

jumlah pendapatan yang diterima pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

D. Pandangan Perspektif Islam Tentang PAD

Pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau oleh umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Pada dasarnya distribusi pendapatan dan kekayaan berdasarkan maslahat dan batas waktu, sementara distribusi pendapatan dilandasi oleh produksi, barter, dan pertimbangan-pertimbangan pasar. Sedangkan redistribusi berlandaskan pada pertimbangan keagamaan, moral, keluarga dan sosial (atau biasanya disebut transformasi sosial).

Secara garis besar, redistribusi kekayaan dan pendapatan dalam Islam dikenal melalui tujuh cara :

1. Zakat

Zakat yang diwajibkan hanya atas orang-orang kaya dengan ketentuan telah mencapai nisab.

2. Sedekah

Sedekah atau kegiatan filantropi yang dianjurkan lembaga zakat. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Ma*

naqasha malunmin shadaqatin" yang menyiratkan bahwa setidaknya nilai harta tidak akan berkurang bila disedekahkan, disamping itu fungsi sedekah juga dianggap sebagai tindak pencegahan terhadap instabilitas atau bala bencana berdasarkan pada sabda beliau yang lain, "*Badiru bi as shadaqati fa inna al bala la yatakathaha*".

3. Belanja Wajib

Belanja halal yang wajib baik dikarenakan perkawinan seperti belanja untuk istri atau dikarenakan kebutuhan seperti belanja yang dikeluarkan untuk keluarga atau kerabat faqir yang diwarisi atau untuk orang yang tidak atau kehabisan bekal dalam perjalanan.

4. Kafarat

Kafarat atau denda yang bentuknya bisa pembebasan hamba sahaya (untuk denda membunuh, zihar dan membatalkan sumpah); dalam bentuk memberikan makanan bagi orang fakir (untuk denda membatalkan sumpah, zihar bila tak mampu puasa dua bulan berturut-turut, dan denda melanggar larangan ihram); dan dalam bentuk pemberian pakaian yang baik bagi orang fakir (denda pembatalan sumpah).

5. Nadzar

Nadzar yaitu dalam kasus seseorang yang mewajibkan dirinya untuk melakukan perbuatan mubah karena mengagungkan Allah misalnya dengan nadzar (komitmen) untuk bersedekah, dll.

6. Sembelihan

Daging sembelihan pada hari idul adha.

7. Intensif Negara

Intensif Negara yang diberikan oleh pemerintah pada saat distribusi pendapatan dan kekayaan tidak adil dan adanya disparitas yang sangat besar antara yang kaya dan yang miskin.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data tingkat kemandirian, efektivitas dan pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lebak sepanjang tahun penelitian yang dilakukan atau sepanjang tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 ialah sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Lebak belum bisa dikategorikan suatu daerah kota/kabupaten yang mandiri atau tingkat kemandiriannya rendah sekali. Berdasarkan hasil analisis data, tingkat kemandirian Kabupaten Lebak belum mencapai angka

50%, karena peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Lebak sepanjang periode 2012 sampai dengan 2018. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

2. Tingkat rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak sangat efektif, karena nilai prosentase berdasarkan 7 tahun terakhir rata-rata anggaran PAD terealisasi di atas 100%. Berdasarkan kriteria pedoman rasio efektivitas pendapatan daerah, jika realisasi suatu pemerintah daerah di atas 100% maka realisasi pendapatan sangat efektif. Penurunan rasio efektivitas terjadi disebabkan karena pendapatan daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya. Dengan menurunnya rasio ini juga menunjukkan pemerintah Kabupaten Lebak dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam meningkatkan pendapatan daerah.
3. Tingkat rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak terjadi naik dan turun sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. Penurunan pendapatan asli daerah yang terjadi pada

pemerintah Kabupaten Lebak hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

4. Secara garis besar, redistribusi kekayaan dan pendapatan dalam Islam dikenal melalui tujuh cara yaitu, Zakat, Sedekah, Belanja Wajib, Kafarat, Nadzar, Sembelihan, Intensif Negara.